

ABSTRAK

Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta Tahun 1966-1998

Oleh:
Ilmiawati Safitri
11407144028

Bioskop telah ada di Kota Yogyakarta sejak awal tahun 1900-an yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Melalui perkembangannya menonton film di bioskop merupakan salah satu hiburan yang paling digemari masyarakat kota ini. Masa kejayaan bisnis perbioskopian di kota ini terjadi ketika pemerintahan Soeharto, khususnya pada tahun 1970-1990-an. Disebut masa kejayaan karena merebaknya pendirian gedung bioskop. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan bisnis perbioskopian di Kota Yogyakarta pada tahun 1966-1998, yaitu pada masa Orde Baru dengan berbagai kebijakan yang ada di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yang menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama, heuristik, yaitu tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber yang didapatkan berasal dari Sinematek Indonesia, ANRI, Perpustakaan, BPS Provinsi DIY, dan lain-lain. Selain itu penulis juga banyak menggunakan wawancara dengan para pelaku. Tahap kedua, verifikasi atau kritik sumber yaitu tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang diperoleh baik dari segi fisik dan isi sumber. Tahap ketiga, interpretasi atau penafsiran yaitu pencarian keterkaitan makna hubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Tahap keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian tulisan dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pasang surut usaha bioskop di Kota Yogyakarta disebabkan oleh empat faktor, yaitu situasi politik, kepemilikan modal, regulasi pemerintah dan perkembangan teknologi. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam bisnis perbioskopian terjadi monopoli, dan hanya pengusaha besar saja yang dapat bertahan. Bisnis perbioskopian di Kota Yogyakarta merupakan bisnis bioskop terbesar secara finansial dan material di Provinsi DIY dan Jateng. Usaha kepengelolaan bioskop menjadi salah satu ladang usaha yang menguntungkan pada masa tersebut. Banyak pengusaha yang mendirikan gedung bioskop di kawasan strategis. Industri perfilman juga dalam masa kejayaannya, karena produksi yang bertambah setiap tahun. Kejayaan bisnis ini tidak berlangsung lama, yang pada awalnya menguntungkan namun pada akhirnya membawa kerugian. Penyebabnya beragam, diantaranya adalah munculnya televisi swasta dan peredaran VCD dan DVD, juga munculnya Grup 21.

Kata Kunci: Perbioskopian, Yogyakarta, Orde Baru

A. Pendahuluan

Perbincangan mengenai perfilman dimanapun tidak dapat dilepaskan dari peran bioskop sebagai penghadir film ke tengah-tengah masyarakat. Bioskop merupakan tempat untuk menonton pertunjukan film menggunakan layar lebar dan gambar film yang diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor.¹ Kehadiran bioskop merupakan tempat bertemunya jasa informasi yang bernama film dengan penonton sebagai konsumennya. Hal ini mempunyai arti bahwa bioskop merupakan ujung mata rantai perfilman.

Film sampai di Hindia Belanda pada akhir abad 19. Film perdana yang diputar adalah film dokumenter.² Seiring berkembangnya teknologi Eropa dan Amerika, yang pada mulanya hanya film dokumenter yang dipertontonkan, maka film-film buatan Eropa mulai dipasarkan di Batavia. Di penghujung abad 19 dan di awal abad 20 ini pertunjukan bioskop belum memiliki tempat yang tetap. Pemutaran film berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain.³

Pada tahun 1900-an sampailah '*gambar idoeop*' di Yogyakarta. Seorang Belanda bernama End Muller mendirikan sebuah gedung bioskop di Jalan Malioboro

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 134.

² M. Sarief Arief, *Politik Film di Hindia Belanda*, (Depok: Komunitas Bambu, 2009), hlm 13.

³ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 27.

dan diberi nama “Al-Hambra”. Gedung bioskop ini terdiri dari dua bangunan, yaitu Al-Hambra di gedung bagian depan dan “Mascot” di bagian belakang, Al-Hambra merupakan bioskop kelas atas. Orang-orang yang bisa menonton di sana hanyalah orang-orang Eropa, bangsawan keraton, para pamongpraja, dan para pengusaha Tionghoa. Orang-orang pribumi biasa hanya bisa menonton di Mascot.⁴ Pada masa Pemerintah Kolonial inilah, terjadi kesenjangan antara masyarakat non pribumi dan masyarakat pribumi. Keadaan seperti ini berakhir ketika Jepang datang ke Indonesia dan merebut kekuasaan yang dipegang Pemerintah Kolonial.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang memberikan kebijakan yang lebih longgar terhadap masyarakat pribumi dalam berbagai hal, salah satunya dalam dunia hiburan bioskop. Pada masa kependudukan Jepang, pribumi diperbolehkan masuk ke bioskop kelas atas saat itu, yang dulunya hanya dikhususkan bagi kaum Belanda atau Eropa. Pemerintah Jepang mewajibkan semua bioskop menyediakan separuh dari kapasitas tempat duduk untuk kelas rakyat dengan tujuan mengundang semakin banyak pribumi untuk datang ke bioskop. Selain itu, dioperasikan pula *layar tancap* yang memutar film-film propaganda mulai Desember 1943 di lima kota di Jawa.⁵

⁴ Antariksa, “Ke Bioskop Yogyakarta, 1916-1960” dalam *Buletin Clea*, edisi 4, Mei-Juni 2003, hlm. 12.

⁵ S.M Ardan, *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*, (Jakarta: GPBSI, 1992), hlm. 34.

Setelah Jepang pergi dari Indonesia, maka merdekalah bangsa Indonesia dengan presiden pertamanya Soekarno. Soekarno pada pemerintahannya menjadikan film sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan jiwa nasionalisme kepada seluruh masyarakatnya. Pada masa Soekarno ini industri perfilman nasional sedang melakukan berbagai upaya untuk mengembangkannya, muncul perusahaan-perusahaan nasional dalam bidang perfilman untuk lebih memproduksi film-film nasional yang pada masa tersebut film impor masih mendominasi.

Pada akhir pemerintahannya, gejolak politik terjadi. Akhir pemerintahan Soekarno dunia perfilman diwarnai oleh banyak tekanan politik dari PKI melalui organisasi bawahannya di bidang kesenian dan kebudayaan yang dikenal dengan nama LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Lekra mengganyang habis-habisan semua film yang diproduksi oleh Amerika yang diimpor ke Indonesia melalui AMPAI. Aksi pemboikotan total yang dilakukan oleh Lekra ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 1964. Aksi ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap bisnis perbioskopian dalam negeri yang pada saat itu bergantung pada film Amerika.

Pada perkembangannya, usaha bioskop kembali bersinar pada awal pemerintahan Soeharto setelah beberapa kali mengalami masa keterpurukan sebagai dampak dari gejolak politik 1965. Beberapa kebijakan dirancang oleh pemerintahan Soeharto sebagai upaya untuk kembali memajukan dunia perfilman dan perbioskopian di Indonesia.⁶ Pemerintah Orde Baru mulai mencoba mengatasi kelesuan di bidang

⁶ Endi Zulkarnaen, "Bioskop di Kota Klaten 1950-an-2000-an", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 7

film dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Tindakan pertama adalah menyuplai ulang bioskop-bioskop yang ada di Indonesia, tak tekecuali Yogyakarta dengan 300 judul film pada tahun 1967. Pada masa awal Orde Baru ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi para importir untuk memasukkan film impor sebanyak-banyaknya. Hasilnya kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun Perfilman Nasional.

B. Latar Belakang Berdirinya Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta

Bioskop di Kota Yogyakarta merupakan bioskop yang mengedepankan unsur bisnis. Bioskop pertama kali hadir di Kota Yogyakarta pada tahun 1916. Pendiri bioskop tersebut adalah orang Belanda bernama End Muller. Kehadiran pertama kali bioskop ini disambut baik oleh masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda terdapat klasifikasi bioskop untuk para bangsawan atau orang Eropa dengan pribumi. Kesenjangan sosial ini diperlihatkan dengan perbedaan gedung bioskop yang dibangun, Bioskop Al Hambra dikhususkan untuk kalangan elit dan Bioskop Mascot untuk kalangan pribumi, yang fasilitas dan harganya tentu sangat berbeda.

Bioskop pada awalnya tidak hanya digunakan sebagai tempat pemutaran film. Bioskop juga digunakan sebagai tempat pertemuan suatu komunitas, dan sebagai tempat pertunjukan lainnya, seperti pertunjukan ular berbisa sebelum pemutaran film, pertunjukan orkes, tonil, komedi stambul dan sandiwara. Pada masa kependudukan Jepang, Belanda telah pergi dari Indonesia. Bioskop digunakan sebagai tempat penyebaran propaganda Jepang. Jepang menggunakan film sebagai media penyebaran

misi dan visinya untuk mempengaruhi masyarakat bahwa Jepang adalah penyelamat Indonesia. Pada masa Jepang ini, klasifikasi bioskop tidak seketat ketika penjajahan Belanda dimana kesenjangan sosial begitu mencolok. Pada masa Jepang, masyarakat kelas bawah diberi kursi 50% untuk tetap bisa menonton di bioskop-bioskop mana saja. Hal ini karena tujuan utama Jepang menjadikan film sebagai alat propaganda kepada seluruh lapisan masyarakat.

Memasuki tahun 1950 usaha perbioskopian di Kota Yogyakarta mulai pulih kembali. Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia pertama mulai memperbaiki berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk industri perfilman dan bisnis perbioskopian. Bioskop yang telah ada sejak masa Kolonial dan Jepang mulai diperbaiki fasilitasnya dan mulai memutar film-film yang lebih baik. Penonton mulai berdatangan dan menjadikan bioskop sebagai tempat alternatif melepas penat untuk mencari hiburan. Di Kota Yogyakarta bioskop-bioskop mulai dibangun dan mulai menjadi usaha yang menjanjikan dengan memberikan banyak keuntungan bagi yang mengelolanya.

Pada akhir pemerintahan Soekarno terjadi keriuhan yang dilakukan oleh PAPFIAS (Panitia Aksi Pengganyangan Film-Film Imperialis Amerika Serikat). Tahun-tahun ini ditandai dengan aksi pengganyangan film-film imperialisme Amerika Serikat dengan melakukan pemboikotan, pencopotan reklame film di depan gedung bioskop hingga pembakaran gedung bioskop, akan tetapi aksi pembakaran itu beruntung tidak terjadi di Yogyakarta. Aksi yang dilakukan karena ekspresi

ketidakpuasan terhadap masuknya pengaruh budaya Barat, khususnya budaya Amerika yang masuk ke Indonesia mempengaruhi budaya asli Indonesia. Jumlah bioskop yang sebelumnya berjumlah 700 buah pada tahun 1964, pada tahun 1965 menurun menjadi 350 bioskop.⁷ Bisnis bioskop mengalami penurunan yang sangat drastis akibat gejolak politik yang besar ini.

C. Perkembangan dan Pasang Surut Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta

Pasang surut dalam menjalankan usaha perbioskopian pasti dirasakan, pada tahun 1965 terjadi kekosongan pemasokan film terhadap bioskop-bioskop yang ada di Kota Yogyakarta. Terjadi pemberhentian impor film Amerika oleh Pappias dan pelarangan pemutaran film Amerika di bioskop-bioskop Kota Yogyakarta. Permasalahan ini menyebabkan bioskop-bioskop memutar film seadanya dan film-film nasional kala itu yang boleh ditayangkan. Pasca Pappias dibubarkan, lengser pula pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Digantikan oleh Soeharto dengan pemerintahan Orde Baru yang memberikan kebijakan-kebijakan untuk membangun kembali bisnis perbioskopian dan industri perfilman.

Pada tahun 1960-an bioskop-bioskop mulai banyak dibangun di Kota Yogyakarta. Bioskop Indra, Permata, Soboharsono, Senisono, Rahayu, Royal, Yogya, dan bioskop lainnya telah menjamur di wilayah-wilayah strategis Kota Yogyakarta. Pada saat itu hiburan untuk masyarakat masih terbatas, hiburan yang menyenangkan

⁷ Novi Kurnia, dkk, Novi Kurnia, *Menguak Peta Perfilman Indonesia*, (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI), 2004, hlm. 102.

serupa dengan bioskop belum ada, sehingga bioskop pada kurun waktu 1960-1980 merupakan tempat hiburan favorit untuk berbagai kalangan masyarakat.

Kepengelolaan bioskop di kota Yogyakarta dilakukan dengan berbagai strategi untuk mendapatkan penonton dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Para pengusaha bioskop menggunakan mediasi pengiklanan surat kabar, radio dan kendaraan keliling untuk menyebarkan info penayangan film di tiap bioskop, ini merupakan upaya pengusaha bioskop untuk mendapatkan penonton. Lain halnya untuk mendapatkan film, tiap bioskop memiliki distributor yang berbeda-beda untuk menyuplai bioskop mereka.

Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat enam distributor film yang pernah ada dan mendistribusikan film untuk bioskop-bioskop yang ada di Kota Yogyakarta. Distributor-distributor tersebut berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Bioskop-bioskop yang ingin memutar film tentu memiliki langganan distributor masing-masing, yaitu Sanggar Film, Dwi Sendang, Candi Agung, Ki Ageng Sugi, Upadi Marga Mulia, dan Estu Subur. Keenam perusahaan tersebut merupakan distributor bioskop di Kota Yogyakarta, akan tetapi yang masih bertahan hanyalah Sanggar Film yang ditunjuk oleh Sudwikatmono sebagai distributor tunggal di Jawa Tengah dan DIY, Dwi Sendang Film dan Candi Agung. Lain halnya dengan ketiga distributor Ki

Ageng Sugi, Upadi, dan Marga Mulia yang sudah tidak beroperasi karena kalah saing dan kekurangan biaya operasional.⁸

Jumlah gedung bioskop di Kota Yogyakarta merupakan jumlah bioskop terbanyak yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman hanya memiliki 2 gedung bioskop, Kabupaten Gunung Kidul 1 gedung bioskop, dan Kabupaten Kulon Progo 1 gedung bioskop saja. Apabila dibandingkan dengan Surakarta, usaha perbioskopian di Kota Yogyakarta lebih maju dan dalam segi finansial lebih menguntungkan. Jumlah gedung bioskop yang banyak dan penonton yang antusias terhadap hiburan bioskop, menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota favorit bagi para distributor memasarkan film-filmnya dibandingkan ke kota lain. Hal ini menyebabkan film bioskop yang ada di kota Yogyakarta lebih *Up To Date* dibandingkan kota lain yang ada di sekitarnya. Fasilitas yang lebih baik dan pengelolaan operasional yang dikelola dengan baik menjadikan bioskop di Kota Yogyakarta bisa bertahan lama hingga tahun 2000-an, dimana di kota lain bioskop kelas dua sudah banyak yang tutup.

D. Dampak Kebijakan Orde Baru Terhadap Bisnis Perbioskopian di Kota Yogyakarta dan Faktor Kemundurannya

Kebijakan Orde Baru memberikan dampak terhadap kemajuan perfilman dan perbioskopian Indonesia. Pada tahun 1967 pemerintah memberikan kebijakan dengan

⁸ Wawancara dengan Bapak Soebagjo Abdullah di Jalan Timoho, pada tanggal 20 April 2015 pukul 10.30

membuka kran film impor sebanyak-banyaknya untuk menyuplai bioskop-bioskop di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini memberikan nafas baru bagi pengusaha bioskop untuk memajukan usahanya, karena pada saat itu film nasional masih kalah saing dengan film Amerika. Pemerintah juga menghapus pajak tiket masuk bioskop untuk memberikan pemasukan lebih terhadap bioskop-bioskop daerah. Pada masa Orde Baru pemerintah memberikan kelonggaran terhadap gunting sensor produksi perfilman nasional. Kelonggaran terhadap adegan berbau pornografi dan kekerasan mengakibatkan banyak film nasional yang dihasilkan merupakan film erotis dan vulgar. Dilakukannya kelonggaran gunting sensor terhadap film-film sensual pada Orde Baru dikarenakan pemerintah melarang peredaran film berbau politik yang bertentangan dengan ideologi Orde Baru.

Bioskop sebagai wadah distribusi perfilman baik film impor maupun film nasional diputar di tempat ini. Pada masa Orde Baru perfilman dikendalikan oleh pemerintah di bawah Departemen Penerangan. Produksi perfilman pada masa Orde Baru lebih banyak dibandingkan pada masa Orde Lama, akan tetapi mutu dan unsur kependidikannya kurang diperhatikan oleh orang-orang film dan pemerintah. Kebijakan Orde Baru berlawanan dengan ketika tahun 1964 dimana kran film impor ditutup rapat-rapat, terutama film impor Amerika dan Eropa. Pada masa ini sistem yang diberlakukan adalah sistem dimasukkannya film impor sebanyak-banyaknya untuk menunjang perfilman nasional dan menunjang bioskop-bioskop yang sepi

penonton, karena selera masyarakat pada film Amerika, dan film impor lainnya memang tinggi.

Pada masa akhir pemerintahan Soeharto, industri perbioskopian di Kota Yogyakarta mengalami kelesuan. Banyak faktor yang mempengaruhi berlangsungnya usaha perbioskopian dan akhirnya beberapa diantaranya memilih untuk menutup usahanya. Faktor tersebut ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya persaingan antar bioskop, buruknya pengelolaan dan sistem distribusi. Faktor eksternal lainnya adalah yang pertama karena munculnya siaran televisi, terutama munculnya televisi swasta yang memberikan hiburan lebih hemat dan praktis kepada masyarakat. Kedua, maraknya peredaran VCD bajakan dengan harga yang sangat murah di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, karena krisis moneter pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Naiknya seluruh harga dalam berbagai bidang, membuat produksi perfilman surut dan harga pendatangan film impor yang semakin mahal menjadikan bioskop-bioskop kekurangan pemasokan film. Terakhir, karena kurangnya perhatian dari pemerintah menyebabkan bioskop-bioskop hanya dianggap sebagai sarana bisnis yang kurang penting bagi daerah. Beberapa faktor tersebut menyebabkan mundurnya industri perbioskopian di Kota Yogyakarta pada tahun 1990-an.

E. Kesimpulan

Awal mula masuknya bisnis perbioskopian ini dimulai ketika Belanda menduduki Kota Yogyakarta, hingga pada tahun 1916 didirikan gedung bioskop pertama di kota ini oleh orang Belanda. Pada tahun 1942, Belanda pergi dari Indonesia dan Jepang akhirnya berhasil menduduki Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang ini film dan bioskop digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan propaganda kepentingan mereka.

Selanjutnya, pasca kemerdekaan Indonesia, bioskop lambat laun melakukan pembenahan dari masa keterpurukan ketika dijajah oleh Jepang. Pada tahun 1946 didirikan beberapa gedung bioskop untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat Yogyakarta. Pada masa akhir pemerintahan Soekarno terjadi pengganyangan film Amerika di seluruh bioskop Indonesia, tak terkecuali bioskop yang ada di Kota Yogyakarta. Akibat kerusuhan yang dilakukan oleh PKI ini bisnis perbioskopian menjadi kelam dan banyak bioskop yang merugi karena tidak mendapatkan pasokan film Amerika.

Pergantian pemerintahan pun dilakukan, Soekarno digantikan oleh Soeharto. Soeharto mulai memperbaiki seluruh tatanan yang ada di Indonesia sesuai dengan keinginannya. Berbagai kebijakan diberikan untuk semua bidang, tak terkecuali bidang perfilman dan perbioskopian. Perkembangan bisnis perbioskopian dirasakan ketika Soeharto menjadi presiden, khususnya ketua tahun 1970-1990-an sebelum

modernisasi berkembang dan mempengaruhi perjalanan bisnis perbioskopian di kota ini.

Perkembangan teknologi memunculkan suatu inovasi baru yaitu televisi. Kemunculan televisi ini yang diikuti juga dengan adanya stasiun-stasiun televisi swasta yang menayangkan film-film barat. Penonton yang selama ini harus mengeluarkan uang untuk menonton film di bioskop, dengan mudah menontonnya di televisi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Itulah salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan tutupnya bioskop-bioskop yang ada di Kota Yogyakarta.

Faktor lainnya adalah adanya persaingan antara satu bioskop dengan yang lainnya, maraknya peredaran VCD bajakan, dan juga pajak yang tinggi. Kemunculan sinepleks juga merupakan salah satu faktornya. Konsep bioskop modern yang mempunyai gedung dan fasilitas yang bagus ini, disukai karena mempunyai banyak pilihan film yang bisa disaksikan. Hal ini terkait dengan monopoli distribusi film. Bioskop-bioskop kecil yang tidak tergabung ke dalam kelompok mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan film. Akibatnya bioskop-bioskop tersebut mulai bangkrut dan tutup satu per satu.

F. Daftar Pustaka

1. Sumber Arsip:

ANRI, *Aksi Dukungan Terhadap PAPFIAS*, 1964.

ANRI, *Pembubaran Aktivitas AMPAI dan Penghentian Aktivitas Aksi Boikot Film Amerika Serikat*, 1964.

Arsip Pribadi Toposubroto, Sejarah Berdirinya NV. Perfebi dan Penempatannya di Gedung Jl. K.H.A Dahlan 4 Yogyakarta, 1984.

Biro Pusat Statistik, Data Bioskop Kota Yogyakarta, 1969.

Biro Pusat Statistik, Statistik Bioskop Indonesia, 1986

Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta, Data Industri Perbioskopian Propinsi D.I Yogyakarta, 1985-1998

Kantor Statistik Propinsi D.I Yogyakarta, Data Industri Perbioskopian D.I Yogyakarta, 1976-1981.

Departemen Penerangan R.I, Instruksi Departemen Penerangan R.I Tentang Tatahan Peredaran Film Impor, 1981.

Diparda Propinsi D.I.Y, Pendapatan Subsektor Pariwisata Propinsi DIY Tahun 1992.

Dokumen Pribadi Hasil Rapat Dewan Film Nasional, Bidang Peredaran dan Pertunjukan Film Impor Menjadi Suplisi dan Penertiban Peredarannya, Jakarta: Sinematek, 1986.

2. Buku dan Artikel

Antariksa, "Ke Bioskop Yogyakarta, 1916-1960" dalam *Buletin Clea*, edisi 4, Mei- Juni 2003

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Garin Nugroho dan Dyna Herlina, *Krisis dan Paradoks Film Indonesia*, Jakarta: FFTV IKJ, 2013

M. Sarief Arief, *Politik Film di Hindia Belanda*, Depok: Komunitas Bambu, 2009

Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film di Jawa*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2009

Novi Kurnia, dkk, Novi Kurnia, *Menguak Peta Perfilman Indonesia*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, 2004

S.M Ardan, *90 Tahun Bioskop di Indonesia*, Jakarta: Sinematek Indonesia, 1990.

_____, *Dari Gambar Idoep ke Sinepleks*, Jakarta: GPBSI, 1992.

Salim Said, *Profil Dunia Film Indonesia*, Jakarta : Grafiti Pers, 1982.

3. Skripsi dan Tesis

Ardian Indro Yuwono, “Eksistensi Bioskop Lokal di Indonesia (Studi Kasus tentang Eksistensi Bioskop Lokal NV. PERFEBI di Yogyakarta dan Wonosobo Dalam Perspektif Ekonomi Politik Komunikasi)”, *Tesis*, Yogyakarta: Fisipol, Universitas Gadjah Mada, 2009.

Endi Zulkarnaen, “Bioskop dari Kota Klaten 1950-an-2000”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013.

Indira Ardanaeswari, “Iklan Film Bioskop di Media Cetak di Jawa”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012.

Jufenda Winursito Hayuningtyas, “Ekonomi Politik Distribusi Perfilman Indonesia (Studi Kasus Distribusi Perfilman 21 Cineplex Group dan Blitz Megaplex, Periode 2007 – 2008)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.

Lucy Chrisnawati, “Sejarah Perbioskopian di Kota Surakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.

Muhammad Bayu Widagdo, “Peran Pemerintah dalam Pembuatan Kebijakan Perfilman Indonesia”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Pembimbing

Reviewer

Drs. Djumarwan

HY. Agus Murdiyastomo, M.Hum

NIP. NIP.19560101 198502 1 001

NIP. 19741118 199903 2 001